

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita
Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum
Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor :
151/Pid.B/2015/PN.Mks)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

Muh. Yunus Saputra
NIM: 10300112026

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

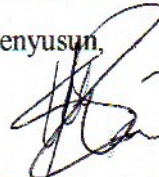
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Yunus Saputra
NIM : 10300112026
Tempat/Tgl. Lahir : Malili, 5 Oktober 1994
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Elang Lambaselo, Sungguminasa Kab Gowa
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan
Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum
Nasional Dan Hukum Islam(Studi Kasus Pengadilan
Negeri Makassar Nomor : 151/Pid.B/2015/PN.Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 21 Maret 2017

Penyusun,




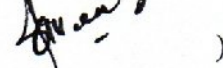


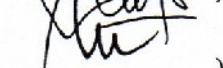
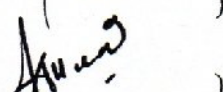
Muh. Yunus Saputra
NIM: 10300112026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam” yang disusun oleh Muh. Yunus Saputra, NIM: 10300112026, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.

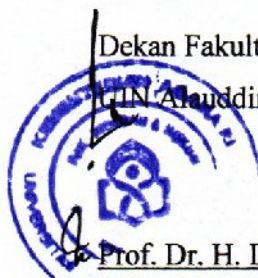
Makassar, 27 Maret 2017 M.
28 Jumadil Akhir 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag	()
Sekretaris	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si	()
Munaqisy I	: Hj. Rahmiati, S. Pd, M. Pd	()
Munaqisy II	: Subhan Khalik, S. Ag, M. Ag	()
Pembimbing I	: Prof. Dr. Achmad Abubakar, M. Ag	()
Pembimbing II	: Dra. Nila Sastrawati, M. Si	()

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

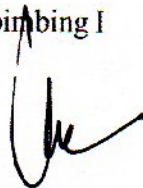
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Muh. Yunus Saputra** NIM: 10300112026, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/Pid.B/2015/PN.Mks)"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di ajukan ke ujian munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 10 Maret 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Ahmad Abubakar, M. Ag
NIP. 1919700701 199403 1001

Pembimbing II



Dra. Nila Sastrawati, M. Si
NIP. 19710712 199703 2 002

Penguji I



Hj. Rahmiati, S. Pd, M. Pd
NIP. 19771005 200901 2 005

Penguji II



Subhan Khalik, S. Ag. M. Ag
NIP. 19701018 199703 1 002

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terucap untuk *Nabiullah* Muhammad saw. Yang telah membawa kebenaran hingga hari akhir.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor:151/Pid. B/2015/PN.Mks)”**.

Kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi semua pihak, baik dalam sugesti dan motivasi moril maupun materil. Karena itu penyusun berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua

orang tua penyusun Ibunda tersayang **Rahmawati** yang selalu membantu dan menyemangati saya melalui pesan-pesan dan kasih sayang yang luar biasa dari beliau dan ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda **Baharuddin** yang selalu tiada henti memberikan semangat, motivasi, bantuan moril dan materil serta do'a restu bagi penulis dari sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Pembantu Rektor beserta seluruh staf dan karyawanya.
2. **Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.** Sebagai dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh stafnya atas segala pelayanan yang diberikan kepada penulis
3. **Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si.** Selaku Ketua Jurusan dan **Ibu Dr. Kurniati, M.Ag.** Selaku sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta stafnya atas izin, pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. **Bapak Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag.** Selaku pembimbing I dan **Ibu Dra. Nila Sastrawati, M.Si.** Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

6. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar beserta stafnya yang telah melayani dan menyediakan referensi yang dibutuhkan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Untukmu yang terkasih dinda **Indah Wulandari** yang selalu mendoakan, menghibur dan memberikan support dikala penyusun lelah dalam menyusun skripsi.
8. Sahabat sekaligus kakak **Muh. Sadli Sabir, SH.i, Muh. Ainun Najib, SH** dan **Miftahul Khair, SH** yang selalu memberikan motivasi kepada penyusun.
9. Sahabat **KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 51** dari Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sukses untuk kita semua kawan.
10. Keluarga besarku yang telah banyak memberi bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan, terkhusus buat ketiga kakakku **Sitti Hadija Bahar, SE, Sitti Hajar S.Si** dan **Dian Maya Sari, S.Kep** terima kasih atas dukungannya.
11. Seluruh staf dosen dan karyawan yang telah memberikan bantuannya selama aku berada di kampus hijau ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku **Ahmad Rusaid Ahyar, M. Haris, Muh. Jihad, Ahmad sofyansa, Irfan Agusti awal, Agus setiawan, Ansar, Nusul Qadri, Aswan**, yang senantiasa menemani dan menjadi saudara selama kami bersama.
13. Terimah kasih untuk kakak **Irwan** yang tak pernah bosan memberikan arahan kepada saya dan selalu memberikan dukungan.

14. Seluruh mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang setiap saat mewarnai hidupku dalam suka dan duka.

15. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan dan kepada kalian diucapkan terima kasih.

Upaya maksimal telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman pada umumnya. *Amin yaarabbalalamin.*

Billahi taufik wal hidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 21 Maret 2017

Penyusun,

Muh. Yunus Saputra
NIM: 10300112026

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11-49
A. Tindak Pidana	11
B. Tinjauan Umum Melarikan Wanita dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam	18
C. Tinjauan Umum Pengaduan.....	26
D. Tinjauan Umum Dakwaan	32
E. Pidana dan Pemidanaan.....	37
F. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	46

BAB III METODE PENELITIAN	50-54
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	50
C. Sumber Data	51
D. Metode Pengumpul Data	51
E. Instrumen Penelitian	52
F. Teknik Pengolahan dan analisis Data	52
G. Pengujian dan Keabsahan Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55-79
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Putusan Nomor: 151/Pid.B/2015/PN.Mks.....	55
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Sesuai Putusan Nomor: 151/Pid.B/2015/PN.Mks.....	67
C. Bentuk Aturan Dalam Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat	76
BAB V PENUTUP	80-81
A. Kesimpulan	80
B. Implikasi	81
DAFTAR PUSTAKA	82-84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab –Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	i dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah dan yā'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اُ	<i>ḍammah dan wau</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَالَ : *qāla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya

adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpiah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ditransliterasikan dengan huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya yang dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

سَيِّءٌ : *Syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh, contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله dīnullāh billāh

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ Hum fī raḥmatillāh

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata Mubārakan

Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *Subhanahu wa Ta'āla*

saw. = *shallallāhu 'alaihi wasallam*

a.s. = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4
HR	= Hadis Riwayat
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.	= Tanpa tempat
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

ABSTRAK

Nama Penyusun : Muh. yunus Saputra
Nim : 10300112026
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/Pid.B/2015/PN.Mks)

Skripsi ini merupakan studi tentang tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat perspektif hukum nasional dan hukum Islam (studi kasus pengadilan negeri Makassar nomor:151/Pid.B/2015/PN.Mks). Penulis mengambil rumusan masalah dalam skripsi yaitu: bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat, serta bentuk aturan dalam hukum Islam terhadap melarikan wanita dengan tipu muslihat.

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian Sosio yuridis dan normatif Syar'I (hukum Islam). Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer berupa penelitian lapangan dan data sekunder berupa pengumpulan data dan melihat berbagai referensi seperti jurnal, buku-buku, dokumen, dan bahan bacaan lainnya, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: penerapan hukum pidana materil serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 151/Pid.b/2015/PN.Mks. telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 332 Ayat (1) ke-2, Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa memiliki banyak pertimbangan, mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan bentuk aturan atau sanksi dalam hukum Islam terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat yaitu di derah sebayak 100 kali dan di saksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman karena perbuatan tersebut merupakan zina.

Adapun implikasi dalam Penelitian ini yaitu untuk masyarakat pada umumnya terutama bagi orang tua agar memberikan pengetahuan kepada anaknya tentang dampak pergaulan saat ini. Dan hakim harus lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya dalam proses peradilan agar tercipta rasa adil dalam menjatuhkan suatu putusan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dan kebaikan adalah dua bagian yang tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia. Keduanya adalah dua bagian yang saling melengkapi, di mana ada kebaikan, kejahatan pasti ada, yang salah satunya tidak dapat berdiri sendiri ini semua karena adanya niat seseorang sehingga melakukan sebuah kejahatan. Niat di sini di artikan sama dengan kesengajaan tetapi sebaliknya telah menimbulkan perbedaan pandangan walaupun semua pakar hukum berpendapat luas ialah semua bentuk kesengajaan.¹

Kejahatan merupakan suatu nama atau cap yang diberikan Orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian pelaku di sebut penjahat. Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat ditangkap secara spontan adalah segala sikap dan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain baik yang bersifat ekonomis, materil maupun yang bersifat immateri yang menyangkut rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat. Atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma- norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, karena definisi kejahatan sangat relatif. Dalam artian pendefinisian kejahatan bisa berbeda-beda antara masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain suatu perbuatan bisa dikatakan kejahatan pada masyarakat tertentu, akan tetapi pada masyarakat yang lain hal tersebut tidak dikatakan suatu kejahatan.²

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 9.

²G. W Bawenang, *Pengantar Psikologi Kriminal* (Jakarta: PT. Pradnya Paramida, 1991), h. 7

Dalam hal ini perempuan pada umumnya dianggap sebagai makhluk yang lemah, sehingga kadang-kadang mengalami penghinaan, penindasan atau pelecehan. Dengan kata lain tidak dibenarkan untuk menyalahgunakan kehidupannya atau menganggap rendah kedudukannya. Bagaimana pun mereka adalah insan Tuhan yang memerlukan persamaan derajat dan wajib kita hargai dan hormati juga. Dan ketika kita tidak menghargai dan menghormati maka di situlah muncul kejahatan berbuat semaunya kepada perempuan dengan memberikan banyak alasan sehingga perempuan tersebut ikut larut akan perkataan seseorang yang melakukan tipu muslihat, sehingga muncul suatu pelanggaran hukum baik dari hukum nasional maupun hukum Islam. Sebagai insan tuhan perempuan ditakdirkan untuk dapat berpasangan dengan laki-laki dalam suatu tatanan kehidupan di dunia ini. Dengan demikian, seharusnya tidak ada perbedaan kedudukan antara perempuan dan laki-laki.³

Adapun kejahatan secara sosiologis ini lebih luas dari pada pengertian secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum, melainkan juga pada segi-segi di luar yang diatur hukum. Misalnya sesuatu tidak melanggar hukum, tapi patut mendapat celaan dari masyarakat seperti buang air sembarang tempat, atau melakukan hubungan seksual yang tanpa adanya paksaan, ini tidak di hukum. Sedangkan secara yuridis tidak dihukum, sebab tidak diatur dalam kitab undang-undang. Akan tetapi kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang dalam arti melanggar terhadap undang-undang hukum pidana Indonesia, inilah yang menjadi ukuran apabila suatu perbuatan tersebut bisa dikatakan kejahatan atau tidak. Jika perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang dan diancam dengan suatu pidana, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka perbuatan tersebut dapat

³Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 53.

dikatakan pelanggaran hukum. Sebaliknya jika perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang hukum pidana, maka perbuatan tersebut bukan dinamakan kejahatan, karena perbuatan tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Sesuai dengan hal itu, Anselm Von Feuerbach PAF Lamintang 1 merumuskan secara mantap dalam bahasa latin yaitu :

1. *Nullapoena sine lege* : Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang.
2. *Nullapoena sine criminie* : Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana .
3. *Nullumcrimen sine poenalegal* : Tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.⁴

Dalam Hukum Pidana sendiri dikenal 2 kategori yaitu: Kejahatan dan Pelanggaran. Hukum Pidana Indonesia telah mengaturnya secara positif dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan di atur dalam buku II dan pelanggaran pada buku III.

Setiap anggota masyarakat yang melanggar aturan-aturan hukum yang ada, maka konsekuensi yang diterimanya adalah hukuman. Dan hukuman tersebut sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan yang berjalan di masyarakat dapat berlangsung dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, maka aturan-aturan hukum yang ada harus sesuai dengan keadaan sosial budaya masyarakat untuk menjamin terciptanya rasa keadilan, dengan demikian hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus berlandaskan keadilan yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat.

⁴Paf lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h. 132.

Salah satu bentuk kejahatan yang akan dibahas dalam skripsi Hukum ini adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang, sebagaimana yang diatur dalam buku II Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara khusus akan dikaji dalam pasal 332 KUHP.

Berkaitan dengan hal tersebut, yakni kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 telah memutus perkara tersebut. Setelah melalui beberapa pemeriksaan. Kasus tersebut bermula ketika terpidana mengajak korban untuk bertemu di sebuah tempat di Jl. Gatot Subroto 2 lalu kemudian membawanya ke rumah teman si pelaku dengan alasan ingin mengambil sesuatu. Sesampainya di rumah temannya, pelaku mendorong wanita ke skamar dan melakukan tindakan asusila. Dan dengan bujuk rayu serta tipu muslihat si korban di bawa pergi ke Pangkep dengan menyetubuhinya sebanyak 3 kali, lalu kemudian di bawa ke Kolaka Utara menggunakan kapal feri dari Bajoe Kab.Bone yang mana tanpa seizin orang tua atau wali korban yang berhak atas korban.

Dalam pandangan hukum Islam kejahatan didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggaran-pelanggarannya membawa hukuman yang di tentukannya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau melakukan suatu perbuatan yang tidak di perintahkan, oleh karena itu suatu kejahatan merupakan perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat hukum Islam mencakup bidang Ibadah dan Muamalah. Hukum Islam mengatur manusia terhadap dirinya sendiri antara lain ahlak, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain di antaranya hukum pidana Islam. Dengan demikian, hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam, dan hukum Islam

merupakan bagian dari agama Islam. Dengan demikian tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat dalam Islam di kategorikan sebagai kejahatan dan masuk dalam gerbang perzinahan. Dimana seseorang lelaki melakukan suatu taktik atau jebakan untuk melarikan wanita tersebut dengan maksud dan tujuan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Zina bukan hanya di saat melakukan hubungan seksual, tapi segala sesuatu yang dapat merusak kehormatan seseorang.⁵ Dan ketika zina ada unsur paksaan atau ancaman yang dilakukan oleh seorang lelaki kepada wanita itu masuk dalam kategori pemerkosaan adapun hadis yang berkaitan dengan pemerkosaan yang di riwayatkan oleh At-Tirmidziy no 1453 yaitu:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ حُجْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ
بْنِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْحَدَّ، وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذَكَّرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا"

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Aliy bin Hujr : Telah menceritakan kepada kami Ma'mar bin Sulaimaan Ar-Raqiy, dari Hajjaaj bin Arthaah, dari 'Abdul-Jabbaar bin Waail bin Hujr, dari ayahnya, ia berkata : "Ada seorang wanita yang diperkosa di jaman Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam membebaskannya dari hadd, namun menegakkannya bagi si pelaku pemerkosaan. Beliau tidak menyebutkan bahwa laki-laki itu memberikan padanya mahar" [Diriwayatkan oleh At-Tirmidziy no. 1453].⁶

Maksud dari hadis diatas bahwasanya hukuman had hanya di tegakkan pada pelaku pemerkosaan tidak berlaku pada korban pemerkosaan. Dengan memberikan hukuman had pada pelaku pemerkosaan, di hukum sebagaimana hukuman orang

⁵Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi di Tinjau dari Hukum Islam* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15.

⁶Muhammd bin Isa Al-Tirmidzi, Sunan Al-Tirmidzi, Jilid 4 (Cet. 2. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1395H/1975M), h. 55, No. 1453.

berzina yaitu: jika sudah berkeluarga maka hukumannya dirajam, jika belum berkeluarga hukuman yang di berikan adalah dera sebanyak 100 kali.

Atas dasar ini, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar. Yang mana obyek penelitiannya adalah putusan Pengadilan Nomor 151/ Pid.B/ 2015/PN.Mks. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 2015/PN.Mks.) “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka pokok permasalahan yaitu Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam. Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 2015/PN.Mks.), adapun sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 2015/PN.Mks.)
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 2015/PN.Mks.)?
3. Bagaimanakah bentuk aturan dalam hukum Islam terhadap melarikan wanita dengan tipu muslihat?

C. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian

Adapun Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Deskripsi Fokus

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefenisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting :

- a) Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum larangan yang di sertai suatu ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.⁷
- b) Hukum Islam adalah keseluruhan kitab allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. dari definisi ini hukum islam lebih di dekatkan pada pengertian syariat.⁸
- c) Tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau taktik untuk menjebak seseorang.⁹

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri Makassar judul skripsi ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat.

D. Kajian Pustaka

Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hakim terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu

⁷Tri Andrisman, *Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2005), h. 24.

⁸Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: kencana, 2013), h. 9.

⁹“Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Hukum Islam,” official website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kamusbesarbahasaindonesia.web.id/muslihat>, (28juni2016)

muslihat. Penulis menggunakan literatur yang membahas mengenai permasalahan tersebut. Agar permasalahan lebih fokus terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya sebagai berikut :

1. Ismu gunadi dkk dalam bukunya Hukum Pidana yang membahas tentang kejahatan kemerdekaan orang sesuai dengan *pasal 332* menanamkan schaking (melarikan perempuan) apabila orang melarikan perempuan dengan akal tipu, Kekerasan, atau ancaman kekuasaan, dengan maksud seperti di atas (maksimum hukuman sembilan tahun penjara) menurut ayat 2 penuntut hanya di lakukan atas pengaduan.¹⁰
2. Lis Sutinah dalam bukunya 3 kitab utama hukum indonesia dalam buku itu di jelaskan bahwa sesuai dengan KHUP, *pasal 332 ayat 2* barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan, di ancam paling lama sembilan tahun.¹¹
3. Suriyaman Mustari Pide dalam bukunya Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang menjelaskan tentang melarikan wanita dengan paksaan adalah perbuatan melarikan gadis akal tipu atau dengan paksaan atau dengan kekerasan, tidak atas persetujuan si gadis tersebut. Sistem melarikan gadis dengan paksaan atau rayuan ini jika terjadi sering kali di teruskan oleh kerabat

¹⁰Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 184.

¹¹Lis Sutinah, *3 Kitab Hukum Indonesia* (jakarta selatan: visimedia, 2016), h.77.

yang merasa kehormatannya terganggu kepada pihak kepolisian dengan menggunakan *pasal 332 KUHPidana* sebagai dasar pengaduan.¹²

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang dipaparkan di atas, yaitu sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 2015/PN.Mks.)
- b) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/ Pid.B/ 2015/PN.Mks.)
- c) Untuk mengetahui bentuk aturan dalam hukum islam terhadap melarikan wanita dengan tipu muslihat.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoretis

Karya tulis ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu hukum di bidang penyelesaian perkara tindak pidana di kota Makassar dan dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan akademis yang ingin mengetahui lebih dalam tentang tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat.

¹²Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 32.

b. Kegunaan Praktis

Karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada para praktisi hukum yang berkompeten menangani masalah tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam Belanda dengan demikian juga Hindia Belanda (KUHP), dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Para Pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau Perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah:

- a. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum Jerman.
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti :

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukuman
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Secara *literlijk* kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh, dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* di terjemahkan juga dengan kata hukum, padahal sudah lazim hukum

itu adalah berupa terjemahan dari kata *recht*, seolah olah arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “*baar*” ada 2 istilah yang di gunakan yakni boleh dan dapat. Secara literlijk bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* di gunakan 4 istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literijk feit* pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tidak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP.

Sedangkan untuk kata “peristiwa”, menggambarkan pengertian yang lebih luas dari perkataan perbuatan, karena peristiwa tidak saja menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup pada seluruh kejadian yang tidak saja di sebabkan oleh adanya perbuatan manusia semata, tetapi juga oleh alam, seperti matinya seseorang karena di sambar petir atau tertimbun tanah longsor yang tidak penting dalam hukum pidana. Baru menjadi penting dalam hukum pidana, apabila kematian orang itu di akibatkan oleh perbuatan manusia (pasif ataupun aktif) sedangkan istilah delik secara *literlijk* tidak ada kaitannya dengan istilah *strafbaar feit*, karena istilah ini berasal dari kata *delictum* (latin), yang juga di pergunakan dalam perbendaharaan hukum belanda: *delict*, namun isi pengertiannya tidak ada perbedaan prinsip dengan istilah *strafbaar feit*.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.¹³ Menurut Pompe *Strafbaarfeit* secara teoretis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

dengan sengaja maupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjadinya kepentingan hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Istilah *Strafbaarfeit* haruslah dihubungkan dengan sifat *wederrechtelijk* atau *aan schuld wijten* atau yang bersifat melawan hukum, yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Menurut Jonkers, *Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan. Keterhubungan dengan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan. Keterhubungan dengan sifat *wederrechtelijk* sangatlah penting, sebagaimana yang dicontohkan oleh Pompe, suatu pelanggaran norma seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang hukum pidana yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan itu bersifat *wederrechtelijk*, misalnya seseorang yang telah membunuh orang lain karena melakukan sesuatu pembelaan diri seperti yang dimaksud dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk menjatuhkan suatu hukuman itu adalah tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu *strafbaarfeit* melainkan harus juga ada unsur *strafbaar* person atau seseorang yang dapat dihukum, dimana orang tersebut dapat dihukum apabila *strafbaarfeit* yang telah ia lakukan itu bersifat *wederrechtelijk* dan ia lakukan dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja.

Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* yaitu :

Sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Simons telah merumuskan yaitu: *Starfbaarfeit* sebagai suatu tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, berhubungan dengan kesalahan, atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Lanjut Moeljatno mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut :

“*Strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”

Dari rumusan Simons tersebut diatas terlihat untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu diisyaratkan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Agar suatu tindakan itu dapat di hukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Setiap *Strafbaarfeit* itu sebagai suatu pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan *onrechmatige handeling*. Manusia

Chairul Huda ternyata memiliki pandangan yang agak sedikit berbeda dengan pandang pakar-pakar pada umumnya. Jika pakar-pakar pada umumnya telah

¹⁴Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakkti, 1997), h. 35

memasukkan faktor-faktor kesalahan dan pertanggung jawaban pidana sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, maka Chairul Huda tidak sependapat dengan hal itu. Menurutnya kesalahan adalah faktor penentu pertanggung jawaban pidana, karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian dari definisi tindak pidana. Artinya apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sudah diluar konteks pengertian tindak pidana.

Sejalan dengan hal itu, Marshal mempunyai pandangan yang sama dengan Chairul Huda Bahwa suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definisi tersebut unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan disini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan akibatnya. Kelakuan juga terdiri dari melakukan suatu omisi dan tidak melakukan suatu omisi.

Singkatnya menurut Chairul Huda dan pakar-pakar lainnya yang sejalan dengan pemikirannya bahwa pada dasarnya suatu tindakan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka setidaknya harus dipahami bahwa tindakan tersebut sebelumnya telah diatur dalam Hukum Pidana melalui alat-alatnya.

Tindak Pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih

dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹⁵

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Di atas telah dibicarakan berbagai rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya.

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli sebagai berikut :

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)”

Perbuatan manusia boleh saja dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tetapi tidak dapat dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataupun tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

2. Menurut R.Tresna, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undngan
- c. Diandakan tindakan penghukuman.”

¹⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), h. 20, h. 27

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti penghukuman. Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

3. Menurut Jonkers, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang)
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- d. Dipertanggung jawabkan.

4. Sementara itu, Schravendijk, merinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan/kesalahan

walaupun rincian rumusan di atas tampak berbeda beda namun pada hakekatnya ada persamaanya, ialah: tidak memisahkan antara unsur unsur mengenai perbuatannya dengan unsur mengenai orangnya. Adapun unsur rumusan tindak pidana dalam KUHP diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang meyertai

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat di tuntutan pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya di pidana

Dari 8 unsur tersebut, ada dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah berupa unsur obyektif. Mengenai unsur melawan hukum adakalanya bersifat obyektif. Misalnya: melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (362) adalah terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum obyektif). Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum obyektif atau subyektif, bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang bersifat obyektif adalah semua unsur yang berada di luar dari keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan obyek tindak pidana. Sedangkan unsur yang bersifat subyektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.¹⁶

B. Tinjauan Umum Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam

a. Perspektif Hukum Nasional

Kejahatan melarikan wanita dengan tipu muslihat merupakan hal yang sangat serius yang harus di perhatikan karena di mana hal tersebut menyangkut masalah kemerdekaan orang. Kemerdekaan orang adalah perbuatan kejahatan terhadap suatu

¹⁶Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 79-82

hak asasi manusia yang selalu menonjol dari dahulu kala sampai dengan sekarang dimana hak seorang manusia untuk memenuhi kepentingan dalam masyarakat.

Dalam hal kejahatan atas kemerdekaan orang, telah di atur pada judul XVIII Buku II KUHP dari pasal 324-337 KUHP. Adapun penggologan pasal-pasalnya akan di uraikan sebagai berikut:

Namun dalam kasus ini, Penulis hanya akan lebih terfokus pada Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat pada pasal 332 KUHP yang berbunyi :

1. Bersalah karena melarikan wanita, diancam dengan pidana penjara:

Ke-1: Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

Ke-2: Paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang perempuan, dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap perempuan itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

2. Penuntutan hanya dapat dilakukan atas`pengaduan.

3. Pengaduan dilakukan :

- a. jika perempuan ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin.
- b. Jika perempuan ketika dibawa pergi sudah dewasa oleh dia sendiri atau suaminya.

4. Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan perempuan yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan *Burgerlijk Wetboek* maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal.

Unsur delik Pasal 332 KUHPidana.

(1) Ke- 1:

- Barangsiapa
- Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur dengan persetujuannya
- Tidak dikehendaki orangtuanya atau walinya
- Untuk dikuasai baik untuk dikawin maupun tidak dikawin.

Ke- 2:

- Barangsiapa
- Membawa pergi seorang wanita
- Dengan tipu muslihat atau kekerasan atau ancaman kekerasan
- Untuk dikuasai baik untuk dikawin atau tidak dikawin.

Delik ini pada umumnya disebut “delik melarikan seorang wanita”. Dalam masyarakat di Indonesia perbuatan ini pada umumnya merupakan perbuatan tabu, karena menyangkut kehormatan keluarga, sebab keluarga akan tercemar terlebih lagi kalau wanita itu dikuasai untuk tidak dikawini. Penilaian masyarakat terhadap wanita yang dilarikan lebih rendah derajatnya dibanding wanita yang lain, karena dianggap sudah ternoda.

Untuk meredam dari kehancuran kehormatan keluarga, undang-undang memberi kesempatan kepada pihak keluarga supaya peristiwa tersebut jangan sampai tersiar lebih luas maka kasus akan digelar ke permukaan apabila kasus tersebut diadukan untuk di tuntutan di muka pengadilan Perampasan Kemerdekaan

Pasal 333 KUHP berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.¹⁷

Melawan hukum sebagai bagian inti delik, jadi dalam dakwaan jaksa penuntut umum harus tercantum dan dengan demikian hal itu harus dibuktikan untuk dapatnya dipidana pembuat. Sebagai diketahui, banyak perampasan kemerdekaan dilakukan berupa penangkapan dan penahanan oleh penyidik oleh penuntut umum atau oleh majelis hakim, yang semuanya harus berdasarkan undang-undang.

Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya. Yang dimaksud dengan kemerdekaan di sini adalah kemerdekaan bergerak (*bewegingsvrijheid*). Hambatan terhadap kemerdekaan bergerak bukan saja berupa pengurungan dan penahanan, tetapi juga paksaan psikologis adalah cukup asalkan dengan itu kemerdekaan bergerak orang dihambat.

¹⁷Soenarto Soerojibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 201-202

b. Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan hukum Islam tindak pidana melarikan wanita merupakan salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum Islam karena di mana sumber utama hukum Islam yaitu Alquran menurut bahasa berarti bacaan, menurut istilah, Alquran adalah himpunan wahyu Allah yang di turunkan kepada nabi Muhammad SAW, Untuk di sampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.¹⁸ Di dalam kasus ini sudah jelas bahwasanya perbuatan yang di lakukan oleh seorang lelaki sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun ajaran Islam dan tidak menjadikan Alqur'an sebagai pedoman hidup sehingga segala sesuatu yang tidak di perintahkan oleh Allah SWT justru di lakukan, di mana seseorang lelaki melarikan wanita tersebut dengan maksud untuk menguasainya dengan melakukan persetubuhan dengan wanita yang di larikannya.

Tipu muslihat merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak di anjurkan dalam ajaran Islam karena perbuatan tersebut sangat merugikan seseorang dengan cara tidak jujur, berkata bohong, dan menyesatkan seseorang. Perbuatan mengenai tipu muslihat dapat dijumpai di dalam Al-Qur'an Surat Al-Shaffaat/37: 98 yaitu:

فَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ سَفَلِينَ

Terjemahnya:

*“Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka Kami jadikan mereka orang-orang yang hina.”*¹⁹

¹⁸Mustafa, Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 4.

¹⁹Depertemen Agama RI., *Al-qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Mahkota, 1989), h. 724

Maksud dari ayat di atas yaitu barang siapa yang melakukan suatu perbuatan dengan mengklabui atau menipu seseorang dengan cara berbohong maka Allah SWT, memasukkan kedalam golongan orang-orang yang hina.

Pemeriksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath'u bi ikraah* atau dengan artian hubungan seksual dengan paksaan. Jika seseorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, maka perempuan tersebut tidak di jatuhi hukuman zina atau hukuman had, baik hukuman cambuk 100 kali maupun hukuman rajam. Dalam Islam pemeriksaan ada dua yaitu:

- a. Pemeriksaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata.

Orang yang melakukan tindak pemeriksaan semacam ini dihukum sebagaimana hukuman orang yang berzina. Jika dia sudah menikah maka hukumannya berupa dirajam, dan jika belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali serta diasingkan selama setahun. Sebagian ulama mewajibkan kepada pemeriksa untuk memberikan mahar bagi wanita korban pemeriksaan, menurut Imam Malik bahwa: apa yang dilakukan di masyarakat kita mengenai seseorang yang memerkosa seseorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia. Jika wanita tersebut adalah budak maka pemeriksa harus membayar nilai yang di hilangkan had (sanksi) Hukuman dalam kasus-kasus semacam ini di terapkan kepada pemeriksa, dan tidak ada hukuman yang di terapkan bagi yang di periksa.²⁰

²⁰Imam Malik Ibn Anas, Al-Muwathta, *Kumpulan Hadis dan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 416

b. Pemeriksaan dengan Menggunakan Senjata

Orang yang memeriksa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, di hukumi sebagaimana perampok. Adapun hukuman perampok dapat kita jumpai di surah Al-maidah: 33 yaitu:

لِمَا جَزَاؤُا ۚ نَ يُجَارِيُونَ ۚ وَوَسْءُ ۚ وَسَعَوْا ۚ فِي ۚ رِض ۚ فَلَمَّا ۚ نَ يَقْلُوا ۚ وَ يُصْلَبُوا ۚ وَ تَقَطَّعَ يَدَيْهِمْ
وَرُءُ لَهُمْ مِّن ۚ لِّفٍ ۚ وَ يُنْفَوُا ۚ مِّن ۚ رِض ۚ ذَ ۚ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ۚ نِيَّا ۚ وَلَهُمْ فِي ۚ خِزْيَةٌ ۚ مَّآبٍ ۚ عَظِيمٌ ۚ ۚ ۚ

Terjemahnya:

*Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah di bunuh atau di salib, atau di potong tangan dan kaki mereka secara silang, atau di asingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.*²¹

Maksud dari ayat di atas bahwasanya seorang pemeriksa dengan mengancam menggunakan senjata, hukumannya sama dengan seorang perampok yaitu: dibunuh, di salib, di potong kaki dan tangannya dengan bersilang, dan di asingkan atau di buang, saat ini bisa di ganti dengan penjara. Ibnu Abdil Bar mengatakan, para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindak pemeriksaan berhak mendapatkan hukuman had, jika terdapat bukti yang jelas, yang mengharuskan di tegakkannya hukuman had, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman selain hukuman had.²²

Tindakan melarikan wanita dengan tipu muslihat adalah salah satu perbuatan yang di larang dalam ajaran Islam karena di dalam kasus ini seorang lelaki menipu seorang wanita agar wanita tersebut ikut, dengan tujuan untuk melampiasakan nafsu

²¹Yayasan Wakaf UMI, *Al-qur'an dan Terjemah* (Depok: Sabiq, 1954), h. 113

²²Ibnu Abdil Bar, (Al- Istidzkar, 7: 146).

bilahi laki-laki tersebut dalam Islam di kategorikan sebagai perzinahan. Tidak hanya zina di larang dalam Islam mendekati pun haram karena perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang sangat di haramkan oleh Allah SWT, firman Allah dalam QS. Al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرُبُوا زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ فَحِشَةً وَسَاءَ سِرَ لًا

Terjemahnya:

*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*²³

Dalam ayat di atas mengandung pengertian atau makna bahwa bukan hanya melarang perzinahan, tetapi semua hal-hal yang dapat mengundang perzinahan, seperti berciuman, berpelukan, dan berpegangan tangan bahkan menatap dengan berulang kali kepada seorang wanita merupakan zina perbuatan tersebut di larang karena sangat terkait dengan akibat atau dampak yang muncul dari perbuatan itu apabila di lakukan. Dengan demikian tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat merupakan perbuatan yang sangat di haramkan karena melarikan wanita tersebut hanya melampiaskan nafsunya dengan melakukan suatu perzinahan. dan sudah jelas di dalam Al-quran bahwasanya larangan untuk umat manusia agar tidak mendakati zina karena perbuatan keji dan jauh dari kemaslahatan hidup manusia.²⁴

²³Departemen Agama RI., *Alquran dan Tafsirnya*, jilid VI (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995), h. 492.

²⁴Hamsah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 70-72.

C. Tinjauan Umum Pengaduan

1. Pengertian Pengaduan

Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib di selesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai pemasyarakatan. Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana di dapat di beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan.

KUHP memperkenalkan jenis tindak pidana yang hanya dapat di tuntutan atas adanya pengaduan, tanpa adanya pengaduan suatu delik tidak dapat di tuntutan. Hal ini berbeda dengan hapusnya kewenangan menuntut yang menerangkan sebab-sebab apa yang menyebabkan hapusnya haka negara untuk menuntut, dalam delik aduan ini penuntutan tidak menjadi gugur tetapi tidak dapat di lakukan karena tidak adanya pengaduan. Karena penindakannya atas dasarf pengaduan, maka pengaduan itu dapat di tarik kembali, itulah bedanya pengaduan dan laporan. Laporan tida menjadi dasar dapat di prosesnya suatu perbuatan, sedangkan pengaduan adalah dasar bagi dapat di proseenya suatu tindak pidana. Tanpa adanya pengaduan tidak mungkin suatu tindak pidana dapat di proses.

Maksud di balik pengaturan ini tidak lain tidak bukan karena KUHP menghormati hak individu karena dalam tindak pidana yang tergolong delik aduan, ada keterkaitannya dengan tindak pidana tersebut dengan masalah yang bersifat privat dari warga negara. Dalam beberapa hal orang yang bersangkutan lebih menguntungkan untuk tidak menuntut perkara itu dari pada keuntungan bagi pemerintah (masyarakat) jika di lakukan penuntutan. Adanya delik aduan ini tidak

mengurangi prinsip oportunitas di mana penuntut umum senantiasa mempunyai kekuasaan untuk mendeponir perkara bagi kepentingan umum.

Jadi tidak semua delik atau tindak pidana dapat diadukan ke pejabat yang berwenang, sebab menurut pasal 108 ayat (1) KUHP, bahwa “dalam hal pengaduan baru dapat dilakukan tindakan atau proses atas dasar pengaduan (permintaan) dari orang yang terkena/korban karena terjadinya tindak pidana. Jadi pengaduan adalah suatu pemberitahuan kepada penyelidik/penyidik untuk melakukan penyelidikan/penyidikan atau suatu peristiwa pidana dari orang yang menjadi korban atau dirugikan karena dilakukannya tindak pidana itu.”²⁵

2. Tindak Pidana Aduan

Masalah delik aduan di atur dalam buku 1 KUHP Bab VII. Delik aduan hanya ada dalam kejahatan, tidak dalam pelanggaran.²⁶ Dalam delik aduan sendiri ada perbedaan delik aduan relatif dan delik aduan absolut yaitu:

a. Tindak Pidana Aduan Relatif (*Relative Klachdelict*)

Tindak pidana aduan relatif pada prinsipnya bukanlah merupakan delik aduan, akan tetapi termasuk laporan (delik biasa). Akan tetapi akan menjadi delik aduan apabila dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri. Jadi penuntutannya dilakukan bukan peristiwanya atau kejahatannya akan tetapi hanya kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana itu. Oleh karena itu, apabila tindak pidana aduan relatif dilakukan penuntutan, maka perkaranya dapat dibelah (*spleit*).

Pasal-pasal dalam KUHPidana yang termasuk tindak pidana aduan relatif, antara lain adalah Pasal 367 KUHPidana (pencurian dalam lingkungan keluarga), Pasal

²⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor, Politeia, 1996), h. 87.

²⁶ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta, Alumni AHM-PTM, 1986), h. 416

370 KUHPidana (pemerasan dalam lingkungan keluarga), Pasal 370 KUHPidana (penggelapan dalam lingkungan keluarga), dan Pasal 394 (penipuan dalam lingkungan keluarga), pasal 411 KUHPidana (perusakan barang).

b. Tindak Pidana Aduan Absolut (*Absolute Klachdelict*)

Yang dimaksud dengan tindak pidana aduan absolut adalah tindak pidana yang dapat dituntut, apabila tidak ada pengaduan dari pihak korban atau yang dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sebab di dalam tindak pidana aduan absolut yang dituntut bukan hukumnya tetapi adalah peristiwanya, sehingga permintaan dalam penuntutan dalam pengaduan harus berbunyi “saya minta agar peristiwa ini dituntut“.

Adapun Pasal-pasal dalam KUHPidana yang termasuk tindak pidana aduan absolut, antara lain adalah pasal 284 KUHPidana (perzinahan), Pasal 287 KUHPidana (Perzinahan wanita di bawah umur), Pasal 293 KUHPidana (Pencabulan anak di bawah umur), Pasal 310 KUHPidana (Penghinaan dengan pecemaran nama baik/ kehormatan seseorang), Pasal 311 KUHPidana (Fitnah sengaja mencemarkan nama baik/ kehormatan seseorang), Pasal 315 KUHPidana (Penghinaan ringan: penghinaan yang tidak bersifat pencemaran), Pasal 317 KUHPidana (Pengajuan laporan/ pengaduan/pemberitahuan palsu kepada penguasa), Pasal 318 KUHPidana (Persangkaan Palsu), Pasal 322/323 KUHPidana (Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena pekerjaan/jabatannya), Pasal 332 KUHPidana (Melarikan seorang perempuan) dan Pasal 369 KUHPidana (Pengancaman).

Dari beberapa jenis tindak pidana aduan yang di tentukan dalam KUHP tersebut, tampak bahwa terhadap tindak-tindak pidana tersebut ukuran kerugian yang

di timbulkan oleh perbuatan tersebut bersifat sangat subjektif. Begitu juga dalam hal perzinahan walaupun secara umum dalam masyarakat Indonesia, perzinahan antar seorang istri atau suami dengan orang lain merupakan bentuk dosa yang paling besar dan merupakan perbuatan yang sangat tercela, dalam sistem hukum masyarakat Barat dianut nilai bahwa hak-hak individu sangat dihormati.

Jadi apabila tindak pidana aduan absolut akan dilakukan penuntutan, maka semua orang yang tersangkut dalam perkara itu harus dapat dituntut dan perkaranya tidak dapat dibelah (*spleit*) atau dipisah-pisahkan satu dakwaan dengan dakwaan lainnya.²⁷

c. Hak Mengadu dan Menarik Aduan

Dalam buku I Bab VII tidak disebutkan siapa yang boleh dan berhak melakukan pengaduan. Dalam pasal-pasal tentang delik aduan ditentukan siapa saja yang boleh mengadu yaitu:

1. Menurut Pasal 72 KUHPidana, yaitu:
 - a. Selama orang yang terkena kejahatan hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain dari pada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu;
 - b. Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri hanya harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga

²⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2011), h. 198-200

sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

- c. Menurut Pasal 73 KUHPidana, yaitu “jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal dunia tidak menghendaki penuntutan”.
- d. Menurut Pasal 293, 319, 322, 335, 369, 489 dan pasal tentang delik aduan relatif di tentukan siapa yang berhak mengadu, yaitu orang yang terkena delik (korban)
- e. Menurut Pasal 284 ayat (2) KUHPidana, bahwa “Tindak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga ulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- f. Menurut Pasal 284 ayat (4) KUHPidana, “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai”.
- g. untuk kejahatan kawin lari pasal 332 KUHPidana yang berhak mengadu adalah wanita yang di bawa lari itu sendiri baik yang sudah berumur maupun yang belum. Dalam hal ini ia belum cukup umur hak mengadu di berikan juga bagi seseorang yang harusmemberi izin bila ia kawin, dan bila ia sudah cukup umur, hak itu di berikan kepada suaminya.

- h. Dalam hal anak-anak yang belum berusia 16 tahun dan belum dewasa atau korban berada di bawah pengampunan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah.

d. Cara dan Bentuk Pengaduan

Dalam hal seseorang yang mengajukan suatu peristiwa sebagai tindak pidana, menurut Pasal 103 ayat (1), (2) dan (3). Pasal 108 ayat (3), (4) dan (5) KUHP, bahwa :

1. Pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pengadu
2. Pengaduan yang dilakukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pengadu dan penyidik.
3. Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus disebutkan sebagai catatan dalam pengaduan tersebut.
4. Setelah menerima pengaduan, penyidik atau penyidik harus memberikan tanda penerimaan pengaduan kepada yang bersangkutan.
5. Batas waktu atau Kadaluarsa Pengajuan Pengaduan

Kadaluarsa/verjaring adalah hilangnya hak untuk melakukan sesuatu tindakan hukum karena lewat waktu, artinya setelah lewatnya waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka tindak pidana tersebut tidak dapat lagi dilakukan penuntutan. Beberapa Pasal-pasal dalam KUHP yang memberikan batasan lewatnya waktu untuk tidak dilakukan penuntutan.

1. Menurut Pasal 74 KUHP yang yaitu:

- a. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di

Indonesia, atau dalam waktu Sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.

- b. Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut.

2. Menurut Pasal 75 KUHPidana, bahwa :

“Pengaduan yang telah diajukan dapat dicabut kembali dalam waktu selama 3 bulan sejak hari pertama pengaduan itu diajukan”.

3. Pasal 293 ayat (3) KUHPidana, bahwa :

“Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing Sembilan bulan dan dua belas bulan.”²⁸

D. Tinjauan Umum Dakwaan

Hakikatnya surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga KUHP mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum (pasal 143 ayat (3) KUHP). Oleh karena itu penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang di dakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materil yang di lakukan terdakwa dalam surat dakwaan. Lengkap adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang di tentukan undang-undang secara lengkap. Penyusunan surat dakwaan ada lima yaitu:

1. Dakwaan Tunggal (satu perbuatan saja)

²⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung, PT. Rafika Aditama, 2011), h. 201-202.

Dakwaan tunggal, apabila jaksa penuntut umum berpendapat yakin dan benar bahwa:

- a. Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja.
- b. Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi termasuk dalam satu ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) KUHP
- c. Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 141 KUHP, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Jadi dakwaan secara kumulatif, yaitu :

1. beberapa tindak pidana dilakukan satu orang sama;
2. beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut;
3. beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan.

Adapun bentuk dakwaan secara kumulatif, adalah sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan *concursum idealis/endaadse samenloop* perbuatan dengan diancam lebih dari satu ancaman pidana. (Pasal 63 ayat (1) KUHPidana), misalnya: pengendara mobil menabrak pengendara sepeda motor berboncengan satu meninggal (Pasal 359 KUHPidana) dan satu luka berat (Pasal 360 KUHPidana);
2. Berhubungan dengan perbuatan berlanjut (*vorgezette handeling*). Perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu kali, misalnya: pemerkosaan terhadap anak dibawah umur (Pasal 287 KUHPidana) dilakukan secara berlanjut (Pasal 64 (1) KUHPidana);
3. Berhubungan dengan *concursum realis/meerdadse samenloop* (Pasal 65 KUHPidana), yaitu melakukan beberapa tindak pidana, dengan pidana pokoknya sejenis atau pidana pokoknya tidak sejenis, *Concursum* kejahatan dan pelanggaran, Gabungan antara alternative dan subsidair, misalnya: pembunuhan beerencana (Pasal 340 KUHPidana) ketahuan orang sehingga membunuh orang tersebut (Pasal 339 KUHPidana), mengambil kendaraan orang yang dibunuh tersebut (Pasal 362 KUHPidana).
4. Gabungan tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Kumulatif penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Jadi dalam dakwaan secara kumulatif, maka tiap-tiap perbuatan (delik) itu harus dibuktikan tersendiri-sendiri pula, walaupun pidanya disesuaikan dengan peraturan tentang delik gabungan (*samenloop*) dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHPidana. Oleh karena itu perlu diperhatikan peraturan gabungan tersebut dan beserta teori-teorinya.

3. Dakwaan Subsidair

Dakwaan secara subsidair yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHPidana, contoh: lazimnya untuk kasus pembunuhan secara berencana dengan menggunakan paket dakwaan primer: Pasal 340 KUHPidana, dakwan subsidair: Pasal 338 KUHPidana, dan lebih subsidair: 355 KUHPidana, lebih subsidair lagi Pasal 353 KUHPidana.

Jadi maksud dari surat dakwaan secara subsidair, yaitu hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair, dan jika dakwaan primair tidak terbukti, maka barulah diperiksa dakwaan subsidair dan apabila masih tidak terbukti, maka diperiksalah yang lebih subsidair.

Dalam praktek untuk dakwaan secara subsidair sering disebut juga dakwaan secara alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair, artinya tersusun primair dan subsidair.

4. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan, di dakwakan beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja di antara rangkaian tindak pidana yang di dakwakan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain yang dapat di buktikan, dan ketentuan manakah yang akan di terapkan oleh hakim. Jadi di sini jaksa penuntut umum mengajukan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau pilihan. Konsekuensinya pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang di maksudkan telah terbukti maka yang lain tidak perlu di hiraukan lagi.

- 1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu ataukah yang lain akan terbukti nanti di persidangan (umpama suatu perbuatan apakah merupakan pencurian atau penadahan).
- 2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana yang mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut.

Lanjut Van Bammel menyatakan bahwa dalam dakwaan alternatif yang sesungguhnya, maka masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

Namun satu hal perlu diketahui, bahwa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan jarang sekali dibuat dakwaan yang alternatif yang sesungguhnya, yaitu dalam satu kalimat dakwaan tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya dakwaan yang berbunyi :

“bahwa perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dapat direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan terlebih dahulu.”

Jadi di sini telah dibuat dakwaan yang bersifat alternatif yang sesungguhnya, sebab tidak dakwaan primair atau dakwaan subsidair, sehingga hakim lah yang dapat memilih perbuatan mana “yang direncanakan atau yang tidak” yang telah terbukti.

5. Dakwaan kombinasi

Sekarang ini dalam praktek berkembang, bentuk surat dakwaan yang di susun secara kombinasi, yang di dalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidier dan atau alternatif atau dapat

juga antara bentuk subsider dengan kumulatif. Di muka sudah di utarakan betapa penting surat dakwaan dalam persidangan pidana, bukan saja untuk penuntut umum dan hakim, tetapi penting pula kepada terdakwa. Jadi surat dakwaan sangat penting bagi jaksa, terdakwa, dan hakim.²⁹

E. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sarjana hukum Indonesia membedakan istilah hukum dan pidana yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang bersal dari perkataan “*wordtgestraf*”. Moeljatno, guru besar hukum pidana pada universitas gajah mada, yogyakarta, menyatakan hal lain dalam salinan KUHP saya berbeda dengan salinan yang lain-lain ialah tentang penggunaan istilah pidana dan di ancam dengan pidana sebagai ganti dari kata belanda “*straf*” dan “*wordtgestraf*”. Dalam buku terjemahan lain di pakai kata-kata “hukuman” dan “dihukum” kiranya istilah “hukuman” dan “dihukum” ini adalah yang konvensional sebab sejak dari dahulu kala sudah di pakai begitu. Hal mana dapat di lihat pada terjemahan WvS dalam bahasa melayu yang di selenggarakan balai pustaka dahulu. Karenanya istilah-istilah yang saya pergunakan tadi adalah inkonvensional, menyimpang dari kebiasaan. Akan tetapi hemat saya untuk menyimpang itu ada alasan kuat sebab

²⁹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 66-67.

mengenai kata pidana sebagai ganti “straf” di mana sekarang sudah di terima oleh umum peristilahan hukum pidana sebagai pasangan dari hukum perdata dan di mana kitab undang-undang hukum pidana sudah umum di pakai, juga oleh mereka yang menggunakan kata-kata hukum dan di hukum , maka konsekuensinya tentu tidak lain dari pada menggunakan kata peristilahan pidana dan diancam dengan pidana setidaknya yang terakhir, kata pidana.

Dalam ilmu hukum, ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah ‘hukuman’, kadang-kadang digunakan untuk pergantian kata “*straf*”, tetapi menurutnya istilah “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”. Istilah “hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Dalam kepustakaan hukum pidana, menurut alam pemikiran yang normatif murni maka pembicaraan tentang pidana akan selalu terbentur pada suatu titik pertentangan yang paradoxal, yaitu bahwa pidana di satu pihak di adakan untuk melindungi kepentingan seseorang, akan tetapi di pihak lain ternyata memeperkosa kepentingan seseorang yang lain dengan memberikan hukuman berupa penderitaan. Sedangkan sehubungan dengan pengertian pidana Soedarto mengemukakan bahwa yang di maksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Roeslan saleh menyatakan pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja di timpakan negara pada pembuat delik itu selanjutnya roelan saleh menyatakan bahwa memank nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir di cita citakan masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat di simpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁰

Adapun pengertian pembedaan adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana. Yang di maksud dengan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum di larang dan di ancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan di tujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang di timbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seseorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto menyebutkan bahwa:

³⁰Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 5-7

³¹Salim, Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h, 149

“Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berchten*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata”.

Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yaitu kerap kali disinonimkan dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

2. Teori dan Tujuan Pemidanaan

Ada tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam hukum pidana yaitu:

a. Teori absolut atau teori pembalasan;

Menurut teori ini, setiap kejahatan haruslah diikuti dengan pidana. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan inilah dasar pembeda dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Mereka menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan, maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan.

b. Teori relatif atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan menyatakan bahwa pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Dengan kata lain pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Teori ini ditujukan untuk masa yang akan datang, yang di mana bermaksud untuk mendidik orang yang telah berbuat jahat agar tidak mengulangi

kembali tindakan melawan aturan atau hukum, dan orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.³²

c. Teori gabungan (*Gemengdetheorie*)

istilah teori gabungan berasal dari bahasa inggris, yaitu combination theory, sementara itu, dalam bahasa belanda di sebut *gemengdetheorie* (teori gabungan) atau teori *verenigingstheorie* (teori persatuan). Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif teori ini dikemukakan oleh Algra dan kawan-kawan mengemukakan pandangannya tentang teori gabungan, teori gabungan berpendapat sebagai berikut.

“biasanya hukuman memerlukan suatu pembenaran ganda pemerintah mempunyai hak untuk menghukum, apabila orang berbuat kejahatan (apabila seseorang melakukan tingkah laku yang pantas di hukum) dan apabila dengan itu kelihatannya akan dapat mencapai tujuan yang bermanfaat”. Teori gabungan memandang sama antar pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana yang di mana teori ini adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif.³³

3. Jenis-Jenis Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP, jenis-jenis pidana digolongkan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu hukuman pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan

³²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), h. 153

³³Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 159

dalam undang-undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan.

a. Pidana pokok

Berikut jenis-jenis pidana pokok yang dirumuskan dalam pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1) Pidana mati

Tujuan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar dengan ancaman hukuman mati, akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah pada zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan keputusan presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari presiden. Pidana mati di tunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati di lakukan memerhatikan kemanusiaan.

2) Pidana penjara

Menurut Andi Hamsah, menegaskan bahwa pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.³⁴

Menurut P.A.F Lamintang Pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan

³⁴Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), h. 36

dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkan orang itu menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatas, seperti hak untuk dipilih dan memilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik dan lain-lain.

3) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan, pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan di bandingkan dengan pidana penjara, ini di tentukan oleh pasal 69 ayat 1 KUHP, bahwa berat ringannya pidana di tentukan oleh urutan-urutan dalam pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

4) Pidana denda

Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda oleh hakim/ pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dipidana. Apabila tidak membayar uang denda yang telah diputuskan, maka konsekuensinya adalah harus menjalani kurungan (jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan, Pasal 30 ayat (2) KUHP) sebagai pengganti pidana denda.

5. Pidana tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif, artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Dengan kata lain, pidana tambahan hanyalah aksesoris yang mengikut pada pidana pokok.

Yang termasuk ke dalam jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas pengampu, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

2. Perampasan barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya pidana denda. Jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim, yaitu berupa barang-barang milik terhukum, yaitu barang yang diperoleh dengan kejahatan dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam pasal 39 KUHP yaitu:

Ayat (1) yaitu Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

Ayat (2) yaitu dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Ayat (3) yaitu perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

d. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP, yang mengatur bahwa: apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Pidana tambahan pengumuman hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesemberonoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal

Tindak pidana tertentu, misalnya Pasal-Pasal 128, Pasal 206, Pasal 361, Pasal 377, Pasal 395, dan Pasal 405 KUHP³⁵

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Edecation, 2012), h. 108-118.

F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak boleh sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana serta adil harus dimiliki oleh seorang hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera. Praktek sehari-hari, baik penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang di kemukakan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Adapun faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya; faktor yang memberatkan misalnya memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim di atur Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang di peroleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan- penentuan kesalahan terdakwa”.

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Adapun alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa

Menurut Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa :

“Pertimbangan hakim ter... pertimbangan yuridis dan fakta- fakta di dalam persidangan.Selain ... , jelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya”.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan perbuatan sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Memang banyak faktor yang harus di perhatikan hakim terutama untuk menjamin objektivitas tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga tertib persidangan, menguasai hukum materil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya hal-hal yang perlu di perhatikan misalnya:

- a. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila di ucapkan di sidang terbuka umum (pasal 195 KUHP)
- b. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain (pasal 195 ayat (1) KUHP).

- c. Kewajiban hakim ketua sidang memberitahukan kepada terdakwa tentang segala haknya, segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan (pasal 196 ayat (3) KUHAP).³⁶

³⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 89-92

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian : Jenis Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan data tanpa menggunakan prosedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran.
2. Lokasi Penelitian : Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, dalam hal ini pengadilan negeri makassar. Lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi tersebut merupakan instansi yang berkompeten dan berwenang untuk memutuskan suatu perkara.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif lapangan, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosio Yuridis

Pendekatan yang mengarah kepada identitas (pengenalan) terhadap hukum nyata yang berlaku, yang implisit berlaku (jelas, tegas diatur) didalam perundangan atau yang diuraikan dalam kepustakaan. Begitu pula diarahkan kepada efektivitas (keberlakuan) hukum itu dalam kehidupan masyarakat.

2. Pendekatan Normatif Syar'i

Pendekatan penelitian ini berdasarkan pada Hukum Islam dengan melihat apa yang ada dalam teks-teks al-qur'an dan hadis serta pendapat-pendapat ulama.

C. Sumber Data

Dalam penulisan proposal ini, untuk mengumpulkan data, maka dilakukan penelitian lapangan dipengadilan negeri makassar dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan melalui interview yaitu kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan Bapak Bonar Harianja selaku hakim di pengadilan negeri Makassar yang menangani kasus melarikan wanita dengan tipu muslihat pada Tanggal 27September2016, agar memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.

2. Data Sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan cara berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, tulisan atau makalah, dokumen atau arsip, dan bahan lain dalam bentuk tertulis yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang membicarakan jawaban atas pertanyaan itu.

2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

2. Buku catatan dan alat tulis

Alat ini digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.

3. Kamera

Alat ini digunakan untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

4. Tape recorder

Berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan dan analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengelohan data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Klasifikasi Data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
- b. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- c. Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.
- d. Editing Data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keragu-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. Analisis data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, kemudian ditabulasi dengan tabel frekuensi dengan rumus statistik sederhana.

G. Pengujian Keabsahan Data

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat ilmiah data penelitian. Maka suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektifitas. Artinya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektifitas, maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, peneliti dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam pengujian penelitian merupakan teknik pengujian kreadibilitas data yang diperoleh dengan melakukan pengecekan atau perbandingan dengan sumber data lainnya, misalnya, triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode dan triangulasi dengan teori. Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Kasus Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat (Studi Kasus Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks)

Hukum pidana materiil menerangkan bahwa perbuatan-perbuatan apa yang dapat di hukum serta hukuman apa yang dapat di jatuhkan, menurut hukum negeri belanda hanyalah tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dengan tegas di nyatakan dapat di kenai hukuman.³⁷ Sesuatu tindakan hanya dapat di kenai hukuman, jika tindakan itu di dahului ancaman hukuman dalam undang-undang. Kitab undang-undang hukum pidana pasal 1 bari 1 yaitu suatu peristiwa tak dapat di kenai hukuman, selain atas kekuatan peraturan undang-undang pidana yang mendahuluinya.

Asas ini baru pada akhir abad ke 18 masuk dlam perundangan –undangan. Sebelumnya, hakim dapat menjatuhkan hukuman atas peristiwa yang oleh undang-undang tidak dengan tegas dinyatakan dapat di kenai hukuman (delik-delik arbitrair, yaitu peristiwa-peristiwa yang di jatuhi oleh hakim menurut pandangannya sendiri). Asas pasal 1 kitab undang-undang hukum pidana berasal dari ajaran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan, menurut ajaran mana tugas hakim hanya terbatas hingga menjalankan undang-undang, kini asas dari pasal 1 itu di pandang, sebagai jaminan yang perlu sekali bagi keamanan hukum para kaula (melindungi orang-orang terhadap perbuatan sewenang-wenang dari pihak hakim).

1. Posisi Kasus

³⁷Mr, L.J, Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009), h. 324

Pada hari selesa tanggal 6 November 2014 bertempat di jl. Gatot subroto 2 Kel. Ujung Pandang Baru kec. Tallo Makassar alias Ikki (Terdakwa) dengan sengaja melarikan wanita dengan tipu muslihat kepada saudari Rahmi (korban) dengan kronologis kejadian sebagai berikut

Berawal dari hubungan teman terdakwa alias ikki dengan korban Rahmi. Pada hari Selasa tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 14.00 wita korban Rahmi ditelpon oleh terdakwa saudara Ikki kalua terdakwa bermaksud ingin bertemu dengan korban dan sekitar pukul 14.30 wita korban bertemu dengan terdakwa di ujung Jl. Gatot Subroto 2 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar. Setelah bertemu, terdakwa dengan korban sempat mengobrol kemudian si korban diajak keluar dengan menggunakan sepeda motor, korban dibawa ke rumah teman terdakwa di Jl. Galangan Kapal dan disitu korban sempat disetubuhi sebanyak satu kali kemudian korban di bawa ke sudiang dan langsung ke Bungoro kab. Pangkep dengan menggunakan pete-pete.

Di sana korban sempat menginap dan sempat disetubuhi lagi lagi sebanyak tiga kali kemudian keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wita. Terdakwa membawa korban ke Pelabuhan Bajoe kab. Bone dengan menggunakan mobil angkutan panther dan naik kapal Veri menuju Kolaka Sulawesi Tenggara dan sempat menginap satu malam. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wita, Korban sempat kabur dan bertemu dengan saudari Ica dan korban di antar ke rumah keluarga saudara Jum. Di perjalanan Korban bertemu dengan Terdakwa Ikki kemudian saudari Ica melapor ke Kantor Polisi KPPP pelabuhan Kolaka dan kemudian saudara Reski alias Ikki di tangkap oleh polisi.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan dalam kasus ini ada dua dakwaan yg disusun secara alternatif, yaitu :

a. Dakwaan Pertama

Bahwa terdakwa Reski alias Ikki pasda hari selasa tanggal 6 november 2014 bertempat di Jl.gatot Subroto 2 kel. Ujung Pandang baru kec. Tallo Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar , “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya di diluar perkawinan” dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa menelpon korban Pr. Rahmi dan bermaksud mengajak ketemuan, setelah terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu mereka berdua sempat mengobrol sejenak di pinggir jalan gatot subroto, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk kerumah temannya di jalan Galangan Kapal dengan alasan mengambil sesuatu. Setelah sampai di salah satu rumah di jalan Galangan Kapal terdakwa kemudian mengajak korban untuk masuk ke ruangan tamu sambil menyuguhkan minuman, beberapa saat kemudian terdakwa menarik paksa korban ke salah satu kamar didalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa melempar tubuh korban ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka dengan paksa seluruh pakaian milik korban , setelah itu terdakwa membuka seluruh pakaiannya dan dalam keadaan tanpa busana terdakwa langsung menindih tubuh korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban.
- b. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum no. VER/18/XI/2014 yang ditandatangani oleh Dr. MAULUDDIN M. Sp.F yang pada kesimpulannya

menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang korban hidup berjenis kelamin perempuan berusia dewasa muda, ditemukan tampak luka memar pada paha kiri dan kanan, dapat sesuai akibat trauma benda tumpul, ditemukan lecet geser pada liang senggama bagian atas dan bawah, tampak kemerahan pada serambi kemaluan dan tampak selaput darah tidak utuh dapat sesuai akibat trauma benda tumpul (dapat sesuai akibat perkosaan) dan pada saat diperiksa korban dalam keadaan tidak dalam keadaan hamil.

c. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

b. Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada dakwaan kesatu diatas, “telah membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan”, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa menelpon korban Pr. Rahmi dan bermaksud mengajak ketemuan, setelah terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu, mereka berdua sempat mengobrol sejenak di pinggir jalan Gatot Subroto, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk kerumah temannya di Jl. Galangan kapal dengan alasan ingin mengambil sesuatu barang di rumah temannya. Setelah sampai di salah satu rumah di jalan galangan kapal terdakwa kemudian mengajak korban untuk masuk ruangan tamu sambil menyuguhkan minuman, setelah beberapa saat terdakwa kemabali membawa korban ke sudiang dan langsung ke Bungoro kab. Pangkep dengan menggunakan angkutan Kota dan

dipangkep terdakwa dan korban menginap di rumah salah satu teman terdakwa. Keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa membawa korban ke Bajoe Kab. Bone dengan menggunakan angkutan umum dan menumpangi kapal Veri menyebrang menuju Kolaka Sulawesi Tenggara dan menginap di rumah teman terdakwa. Keesokan harinya korban melarikan diri dan bertemu saudari Ica yang saudari Ica langsung melaporkan kejadian yang korban alami ke pihak kepolisian setempat.

- a. Bahwa terdakwa membawa lari wanita tanpa mendapat izin dari orang tua atau walinya yaitu Lk. SAMSUDDIN Bin MUJATEBA
- b. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP

3. Fakta-fakta Persidangan

A. Keterangan Saksi-saksi

- a. Saksi NURRAHMI Binti Samsuddin Alias Rahmi, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 1. saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta beresedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
 2. saksi mengerti sehingga di hadirkan dipersidangan sehubungan tindak pidana perkosaan dan dibawa lari hingga ke Kolaka yang korban alami
 3. bahwa korban dan terdakwa hanya teman biasa
 4. bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi melalui Hp dan meminta untuk bertemu sebentar, setelah bertemu terdakwa dan saksi mengobrol sebentar la a mengajak korban pergi dengan

menggunakan sepeda motor dengan alasan mau ke rumah teman terdakwa, setelah sampai di jl. Galangan kapal korban di ajak masuk ke ruangan tamu setelah itu terdakwa menarik korban ke kamar dan mendorong korban ke atas tempat tidur lalu berusaha membuka pakaian korban sampai akhirnya korban dalam keadaan tanpa pakaian terdakwa mencium dan meraba-raba payudara korban.

5. bahwa selanjutnya korban di bawa terdakwa ke bungoro kab. Pangkep dengan menggunakan angkot, di pangkep terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 3 kali, selanjutnya terdakwa membawa korban ke Kolaka sultra dengan menggunakan kapal feri dari Bajoe kab. Bone
 6. bahwa terdakwa membawa pergi saksi tanpa seizing orang tua saksi
 7. bahwa keesokan harinya sekitar pukul 05.00 wita korban kabur lalu bertemu Pr. ICA yang mengantarkan korban melapor ke polisis setempat.
- b. Saksi SAMSUDDIN Bin MUJATEBA di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saat di lakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
 2. Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi korban persetubuhan adalah anak saksi yang bernama RAHMI dan yang telah menyetubuhi anak saksi adalah terdakwa RESKI Alias IKKI
 3. Saksi menceritakan bahwa anak saksi ikut dengan terdakwa karena dibujuk rayu oleh terdakwa.

4. saksi menjelaskan bahwa terdakwa membawa lari RAHMI tanpa seizin saksi sebagai orang tua RAHMI.
 5. Bahwa saksi bersama keluarga dan anggota polisi menjemput korban di kolaka.
- c. Saksi NURDIANA, di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
1. Saat di lakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
 2. Saksi menjelaskan bahwa korban adalah sepupu dari saksi
 3. Saksi menjelaskan bahwa korban sempat mengirim sms kepada saksi yang isinya kalau korban dibawa lari terdakwa, selanjutnya saksi coba untuk menghubungi Hp korban namun Hp korban sudah tidak aktif kemudian saksi bersama suami saksi langsung meneju ke tempat kerja yang sekalian tempat tinggal korban namun Pr. JUM mengatakan jika korban keluar dari siang hari.
 4. saksi tidak mengetahui mengapa terdakwa sampai membawa korban tanpa seizin orang tua korban.

B. Alat Bukti Surat :

Hasil Visum Et Repertum no. VER/18/XI/2014/Rumkit

C. Petunjuk :

Petunjuk sebagai alat bukti yang sah adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan

siapa pelakunya. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan terhadap saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian antara satu sama lain, yang menerangkan bahwa pada hari selasa tanggal 04 November 2015, Terdakwa Ik. MUH. RESKI Alias IKKI telah melakukan Tindak Pidana Membawa Lari Wanita tanpa seizin orang tuanya terhadap korban Pr. RAHMI. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga dapat dijadikan alat bukti petunjuk atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

D. Keterangan Terdakwa :

Terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- a. Saat di periksa Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dan terdakwa mengerti kalau dirinya diperiksa sebagai terdakwa dalam Tindak Pidana Persetubuhan dan membawa lari wanita serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- b. Terdakwa telah mengakui telah membawa lari wanita tanpa seizin orang tuanya, namun mengenai persetubuhan di galangan kapal terdakwa
- c. Mengatakan bahwa dia melakukannya Karena pada saat itu korban lagi haid, nanti di pangkep baru terdakwa setubuhi selanjutnya di Kolaka
- d. Terdakwa selanjutnya membawa korban ke pangkep, selanjutnya terdakwa membawa korban ke Kolaka Sultra

E. Barang Bukti :

- NIHIL

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa, sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

1. Pasal 285 KUHP; atau
2. Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP

Adapun Pasal yang terbukti adalah Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP :

1. Barang siapa
2. Melarikan wanita dengan tipu muslihat
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya.
4. Tuntutan Jaksa

Tuntutan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum pada putusan Nomor 1511/Pid.B/2015/PN.Mks yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Reski alias Ikki terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat, sehingga pada akhir tuntutan pidannya menuntut Majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan wanita dengan tipu muslihat” sebagaimana diatur dalam pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP
- b. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUH. RESKI alias IKKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;

- c. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Analisis penulis

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat tanpa seizin orang tuanya sebagaimana di atur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-2 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melarikan wanita dengan tipu muslihat
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya.

Untuk membuktikannya , penulis akan mengkaji satu persatu unsur-unsur tersebut:

a. Barang siapa

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan atas keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”

Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan terungkap bahwa terdakwa Reski Alias Ikki adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Berdasarkan hal tersebut, keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka sebagai subyek yang dapat mempertanggung jawabkan dalam peristiwa

ini adalah terdakwa MUH. RESKI Alias Ikki, oleh karena mengenai unsur ke-1 “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b. Melarikan wanita dengan tipu muslihat.

Pada kasus ini yang dimaksud dengan melarikan wanita adalah membawa pergi atau menjadikan seorang perempuan dalam kekuasaannya. Berdasarkan fakta yang muncul di persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa Reski alias Ikki betul melarikan wanita dengan mengucapkan janji-janji dan bujuk rayu kepada korban Rahmi yang merupakan cara terdakwa mempengaruhi korban dalam rangka pencapaian tujuan terdakwa untuk dapat membawa pergi korban.

Unsur pasal ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa telah membawa korban ke rumah terdakwa selanjutnya ke Bungoro kab. Pangkep dan terakhir ke kolaka Utara.

Oleh karena itu cara-cara yang dilakukan terdakwa terhadap korban dan dilakukan dalam keadaan penuh kesadaran, tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras sehingga penulis berkesimpulan bahwa terdakwa memenuhi unsur “melarikan wanita dengan tipu muslihat”

c. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya

Fakta pada persidangan mengungkapkan bahwa terdakwa awalnya terdakwa menelpon korban Pr. Rahmi dan bermaksud mengajak ketemuan, setelah terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu, mereka berdua sempat mengobrol sejenak di pinggir jalan Gatot Subroto, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk kerumah temannya di Jl. Galangan kapal dengan alasan ingin mengambil sesuatu barang di rumah temannya. Setelah sampai di salah satu rumah di jalan galangan kapal

terdakwa kemudian mengajak korban untuk masuk ruangan tamu sambil menyuguhkan minuman, setelah beberapa saat terdakwa kembali membawa korban ke sudiang dan langsung ke Bungoro kab. Pangkep dengan menggunakan angkutan Kota dan dipangkep terdakwa dan korban menginap di rumah salah satu teman terdakwa. Keesokan harinya sekitar pukul 15.00 wita terdakwa membawa korban ke Bajoe Kab. Bone dengan menggunakan angkutan umum dan menumpangi kapal Veri menyebrang menuju Kolaka Sulawesi Tenggara dan menginap di rumah teman terdakwa. Selama terdakwa melakukan pelarian terhadap korban, tidak ada usaha dari terdakwa untuk memberitahu keberadaan korban kepada orang tua atau walinya. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur ketiga tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya telah terbukti.

Menurut pendapat bapak Bonar Harianja selaku hakim di pengadilan negeri makassar bahwasanya tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat merupakan masalah yang sangat serius untuk di perhatikan dan mendapat perhatian dari publik karena di mana pada saat ini perempuan di larikan bukan hanya untuk di larikan saja tetapi juga untuk menguasai si wanita tersebut dengan melampiaskan nafsu bilahi si pelaku. Pelaku Melarikan Wanita tersebut dengan beberapa faktor menurut Bonar Harianja mengatakan banyak hal yang menjadi salah satu faktor sehingga lelaki melarikan wanita tersebut salah satunya untuk di jadikan istri karena di daerah Bugis dan Makassar di kenal dengan istilah silariang, hanya untuk melampiaskan nafsu si pelaku, dan parahnya lagi pelaku melarikan wanita tersebut untuk di komersilkan. Hal ini tidak bisa di pungkiri karena hingga saat ini melarikan wanita dengan tipu muslihat yang menjadi pemicu utama adalah faktor-faktor

tersebut. Dimana si pelaku menghilangkan kemerdekaan seseorang, hal ini memang sangat serius karena harga diri seseorang telah hilang dan sudah ternodai.³⁸

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tindak Pidana Melarikan Wanita dengan Tipu Muslihat sesuai Putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas sesuatu peristiwa yang tidak dengan tegas di sebut dan di uraikan dalam undang-undang, misalnya dengan menjalankan terhadap peristiwa itu sesuatu peraturan undang-undang yang dasarnya di langgar oleh peristiwa tersebut atau dengan perkataan lain, sesuatu peraturan undang-undang yang memuat ancaman hukuman terhadap peristiwa yang serupa dengan itu. dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun yang bersifat materil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan jika kemudian putusannya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoretis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani sendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.

³⁸ Bonar Harianja, Hakim Pengadilan Negeri, *Wawancara*, Makassar, 26 September 2016.

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana. Dalam amar putusan, hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “melarikan wanita dengan tipu muslihat”.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2500,- (dua ribu lima ratus);

Hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang termuat di dalam surat Dakwaan dengan Register Perkara No : PDM- 31/Mks/Euh.2/03/2015

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan serta mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi NURAHMI Binti SAMSUDDIN Alias RAHMI
- b. Saksi SAMSUDDIN Bin MUJATEBA
- c. Saksi NURDIANA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara;

- a. Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar hari Selasa tanggal 6 November 2014 sekitar pukul 14.00 wita saksi ditelpon oleh saudara RESKI alias IKKI kalau dia bermaksud ingin bertemu dengan saksi dan sekitar pukul 14.30 wit saksi bertemu dengan saudara RESKI alias IKKI di ujung Gato Subroto 2 kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar;

Bahwa benar saksi korban bertemu sempat mengobrol kemudian saksi korban diajak keluar dengan menggunakan sepeda motor, saksi korban di bawa ke rumah temannya di jl. Galangan kapal dan distu saksi korban sempat disetubuhi sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa untuk

membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa yang didakwakan jaksa Penuntut Umum yaitu dalam dakwaan Alternatif Pasal 285 KUHP atau kedua Pasal 332 ayat(1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melarikan wanita dengan tipu muslihat
3. Tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya;

Ad. 1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiaapa adalah ditujukan kepada orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh jaksa penuntut umum telah dihadapkan seorang terdakwa yang atas pertanyaan majelis hakim dipersidangan menerangkan identitas dirinya dan ternyata adalah sama dengan orang yang dimaksud dalam surat dkwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa Reski Alias Ikki

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dengan dakwaan dan menjawab serta menanggapi baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang

sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap atau mampu bertanggung jawab

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa sehingga unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2 Melarikan Wanita dengan tipu Muslihat

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Awalnya terdakwa menelpon korban Pr. Rahmi dan bermaksud mengajak ketemuan, setelah terdakwa dan Pr. Rahmi bertemu mereka berdua sempat mengobrol sejenak di pinggir jalan gatot subroto, tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban untuk kerumah temannya di jalan Galangan Kapal dengan alasan mengambil sesuatu. Setelah sampai di salah satu rumah di jalan Galangan Kapal terdakwa kemudian mengajak korban untuk masuk ke ruangan tamu sambil menyuguhkan minuman, beberapa saat kemudian terdakwa menarik paksa korban ke salah satu kamar didalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa melempar tubuh korban ke tempat tidur kemudian terdakwa membuka dengan paksa seluruh pakaian milik.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa merayu korban dengan mengumbar janji-janji dan bujuk rayu serta ancaman dari terdakwa serta korban tidak mengetahui jalan pulang dan handphone korban di jual untuk melakukan pelarian, korban akhirnya terpedaya.

Unsur pasal ini terpenuhi dengan adanya keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa telah membawa korban ke

rumah terdakwa selanjutnya ke bungoro kab. Pangkep dan terakhir ke kolaka Utara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, ternyata perbuatan terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh minuman keras, dengan demikian unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatannya telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “melarikan wanita dengan tipu muslihat” telah terpenuhi.

Ad. 3 Tidak dengan Kemauan Orang tuanya atau Walinya

- a. Menimbang bahwa selama korban tinggal bersama terdakwa tidak ada usaha untuk memberitahu keberadaan korban kepada orang tua korban
- b. Menimbang bahwa perbuatan tersebut ternyata dilakukan terdakwa dengan penuh kesadaran tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh obat atau minuman keras dan terdakwa mengetahui apa yang dia lakukan terhadap korban dan mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya terhadap korban.
- c. Menimbang bahwa unsur tersebut telah terpenuhi yang mana terdakwa mengakui jika di membawa korban tanpa seizing orang tua aau walinya, hal tersebut sesuai dengan pengakuan orang tua korban.
- d. Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tidak dengan sepengetahuan orang tuanya telah terpenuhi.

- e. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti menurut hukum, maka perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- f. Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
- g. Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- h. Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan nantinya masih melebihi masa penahanan yang selama ini dijalani oleh terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap dalam tahanan.
- i. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang tua korban merasa malu dan cemas

Hal-hal yang meringankan :

- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dan sopan dalam persidangan.

2. Amar Putusan

Mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa MUH. RESKI Alias IKKI, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “melarikan wanita dengan tipu muslihat”.
- b. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
- c. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah di jalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Memerintahkan terdakwa tetap di tahan;
- e. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2500,- (dua ribu lima ratus);

3. Analisis penulis

bahwa suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan barang bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia. Seberat atau ringan apapun pidana yang dijatuhkan Majelis hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas-

batas maksimum ataupun minimum ppidanaan yang diancamkan oleh pasal dalam undang-undang tersebut.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan “tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat”. Mengenai pertimbangan hukum hakim Penulis akan menguraikan analisis yaitu :

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim harus berdasarkan pada barang bukti hasil dan keterangan saksi-saksi yang sah kemudian keterangan tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang di dakwakan benar-benar terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP. Selain dari yang dijelaskan penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim untuk dapat mempidanakan si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dalam putusan nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks, proses pengambilan keputusan yang dilakukan majelis hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan oleh Penulis sebelumnya\ yaitu berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa bahwa terdakwa betul-betul melakukan tindak pidana yang ditujukan kepadanya.

Kemudian mempertimbangkan tentang pertanggung jawaban perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.³⁹

³⁹Data Pengadilan Negeri Makassar, 27 September 2016

C. Bentuk Aturan Hukum Islam Terhadap Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat

Tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat di dalam hukum Islam merupakan jarimah. Jarimah adalah suatu larangan-larangan syara yang di ancam dengan hukuman had atau ta'zir di dalam kasus ini bukan hanya sekedar melarikan wanita tetapi juga untuk menguasai wanita tersebut dengan menyetubuhinya. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang di larang, atau meninggalakn perbuatan yang di perintahkan, dengan kata-kata "Syara" pada pengertian tersebut di atas, yang di maksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru di anggap jarimah apabila di larang oleh syara. Pengertian jarimah tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum-hukum pidana positif.

1. Dasar Larangan dan Hukuman

Apa yang mendorong untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai jarimah, ialah karena perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau perasaan-perasaanya, atau pertimbangan lain yang harus di hormati dan di jaga. Sesuatu hukuman di ancamkan kepada seseorang pembuat agar orang banyak tidak memeperbuat sesuatu jarimah , sebab larangan atau perintah semata-mata tidak akan cukup. Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi sipembuat sendiri sekurang-kurangnya, namun hukuman tersebut di perlukan, sebab bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.

Sebaliknya, sesuatu jarimah boleh jadi malah membawa keuntungan namun keuntungan ini tidak menjadi pertimbangan syara dan oleh karena itu syara melarang jarimah tersebut karena segi kerugiannya itulah yang di utamakan dalam pertimbangan perbuatan-perbuatan zina, menyerobot hak- milik orang lain, tidak mengeluarkan zakat dan lain-lain, boleh jadi bisa membawa keuntungan bagi perseorangan tertentu tetapi keuntungan tersebut tidak menjadi pertimbangan syara, perbuatan tersebut di larang bukan karena segi keuntungan perseorangan tersebut melainkan karena perbuatan-perbuatan tersebut akan membawa kerugian kepada masyarakat. Ringkasnya, dasar pelarangan sesuatu perbuatan ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Tuhan sendiri yang mengadakan larangan-larangan hukum tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebagaimana juga tidak akan menderita kerugian karena pendurhakaan mereka.

Syari'at Islam sama pendirinya dengan hukum positif (hukuman-hukuman) dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukuman-hukumannya, yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya, yaitu bahwa syari'at menganggap akhlak yang tinggi sebagai sendi masyarakat, oleh karena itu syari'at sangat memeperhatikan soal akhlak, di mana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi tentu di ancam dengan hukuman. Akan tetapi telah mengabaikan soal-soal akhlak sama sekali, dan baru mengambil tindakan apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan masyarakat. Sebagai contoh ialah zina. Hukum positif menghukum perbuatan tersebut, kecuali apabila terjadi perkosaan terhadap salah satu pihak, atau tanpa kerelaan salah satunya, karena dalam keadaan demikian perbuatan tersebut

merugikan perseorangan maupun ketentraman umum. Akan tetapi syari'at menghukum perbuatan zina, dalam keadaan dan bentuk bagaimanapun juga, karena zina di pandanganya bertentangan dengan akhlak dan apabila akhlak sudah rusak maka rusaklah masyarakat.⁴⁰

2. Bentuk aturan dalam hukum Islam

Dalam hukum Islam tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat merupakan salah satu tindakan yang sangat merusak kehormatan seorang wanita karena di mana harga diri seorang wanita di regut dengan cara di larikan dengan menggunakan bujuk rayuan sehingga wanita ikut dalam penguasaan lelaki tersebut dengan melakukan hal-hal yang tidak di perintahkan oleh Allah SWT, dan bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum Islam dalam hukum Islam perbuatan tersebut adalah zina. Adapun bentuk aturan atau sanksi bagi pezina firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Nur (24):2 yaitu

لَزَانِيَّةٌ وَلِرَانِيَّةٌ فَؤُوكُلٌ وَابِدٌ مِّنْهُمَا مِائَةٌ - وَلَا تَزْنِيْكُمْ فِيْهِمَا رَقَّةٌ فِيْ دِيْنٍ - اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِ - وَلِيَوْمِ
خِزْرِ وَلَسَهْدٌ ذَاَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

Terjemahnya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah hukuman mereka di saksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman.

Dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina, baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil baligh, merdeka dan tidak muhsan

⁴⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), h. 1-4.

wajib di dera seratus kali dera, sebagai hukuman atas dosa dan maksiat yang telah di perbuatnya. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat tidak di benarkan bahkan di larang menaruh belas kasihan kepada pelanggaran-pelanggaran hukum itu untuk menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah di gariskan di dalam agama Allah. Hukuman dera hendaklah di laksanakan oleh yang berwajib dan di lakukan di tempat umum, sehingga dapat di saksikan oleh orang banyak dengan maksud supaya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman dera itu mendapat pelajaran tentang perbuatan zina supaya tidak di jatuhi hukuman dera yang menyakitkan dan memalukan itu, Hukuman ini hanya berlaku bagi pezina yang belum kawin.⁴¹ Adapun hukuman pezina dengan unsur paksaan yang dalam ini di kategorikan sebagai (pemeriksaan). Pemeriksaan tanpa menggunakan senjata hukumanya sama dengan seorang pezina yaitu ketika pezina sudah berkeluarga maka hukuman yang di berikan adalah rajam sedangkan pezina yang belum menikah hukumannya adalah cambuk sebanyak 100 kali dan apabila pemeriksaan menggunakan senjata maka hukumannya adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah).

⁴¹Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 80-81

BAB V

PENUTUP

Setelah uraian dan pembahasan yang panjang yang telah dikemukakan dalam membahas penelitian ini, maka penulis akan memberi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang telah dilakukan ini sebagai akhir dari penulisan skripsi ini bagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum materil dalam putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks adalah tepat. Jaksa penuntut umum menggunakan 2(dua) dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan kesatu Pasal 285 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 332 Ayat (10 ke-2 KUHP. Diantara unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan mempertimbangkan dakwaan kedua yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa.
2. Pertimbangan Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 151/Pid.B/2015/PN.Mks menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis. Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti Penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta di persidangan meniali bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan

pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan berkelakuan baik selama persidangan.

3. Bentuk aturan hukum mengenai tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat merupakan salah satu perbuatan zina yang di mana seorang pelaku zina di dera 100 kali dan di saksikan oleh sekumpulan orang-orang beriman.

B. Implikasi Penelitian

Adapun saran-saran penyusun, yaitu:

1. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, demikian pula hakim diharapkan lebih cermat dalam memeriksa dan memberikan pertimbangannya dalam proses peradilan
2. Untuk masyarakat pada umumnya dan terutama pada orang tua agar memperhatikan pergaulan anaknya dan memberitahukan pengetahuan sedikit banyaknya tentang bahaya pergaulan dan dampak yang ditimbulkan, dan memberikan pengetahuan tentang ajaran-ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aandrisman, Tri. *Hukum Pidana*, Bandarlampung: Universitas Lampung, 2005.
- Apeldon, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Mustafa, Wahid Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahan*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Data Pengadilan Negeri Makassar, 24 September 2016
- Depertemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mahkota, 1989
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Tafsirnya Jilid VI*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Djubaedah, Neng. *Pornografi Pornoaksi Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*, Bndung: PT. Rafika Aditama, 2011
- G.w. Bawengan. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1991.
- Gunadi, Ismuidan Jonaedi Efendi. *Hukum Pidana*, jakarta: Kencana, 2014.

Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alauddin University Pres, 2012.

Hamsah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Harianja, Bonar. *Wawancara*, Makassar 26 September 2016

Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.

Kementrian Agama RI. *Al qur'andan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Quran, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Hukum Islam,” official website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <http://kamusbesarbahasaonline.web.id/muslihat> (28 juni 2016).

Lamintang, PAF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Meleong, Aditya Bakti, 1997.

Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Mardani, Bandung, 2011.

Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*. Mesir: Maktabah Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1395 H/1975M.

Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat*, Jakarta: Kencana, 2014.

Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

- Soerjo, MoertiHadiati. *KekerasanDalamRumahTangga*, Jakarta: SinarGafika, 2012.
- Sutinah, lis.3 *KitabHukum Indonesia*, Jakartaselatan: visimedia, 2016.
- Socrojibroto, Soenarto. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Salim, Hs. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Wahid Abdul, Mustafa. *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Yayasan Wakaf UMI. *Al- qur'an dan Terjemahnya*, Depok: Sabiq, 1954.

6/16 ghu la kajar
6

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Buat draft no 1
di 7/6-2016

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : muh.yunus saputra
NIM : 10300112026
Semester/Klpk : VIII / 2
Angkatan : 2012

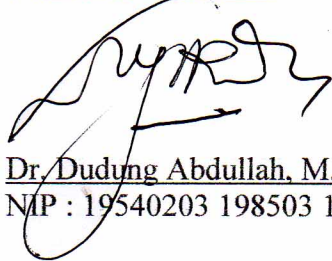
Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut :

1. Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana melarikan wanita dengan tipu muslihat perspektif hukum nasional dan hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar).
- ~~2. Status hukum anak hasil nikah siri dalam perkawinan campuran dalam hukum Islam~~
- ~~3. Analisis tindak pidana Poligami (Studi Komparatif antara hukum nasional dan hukum Islam)~~

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Gowa, 1 Juni 2016

Mengetahui
Penasehat Akademik



Dr. Dudung Abdullah, M.Ag
NIP : 19540203 198503 1 002

Pemohon,



muh.yunus saputra
Nim : 10300112026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt Alauddin Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923

Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa- Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 325 Tahun 2016


T E N T A N G

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAFT/ SKRIPSI
TAHUN 2016

- Menimbang** :
- a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada jenjang Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, untuk itu dipandang perlu menetapkan **Dosen Pembimbing**;
 - b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai **Dosen Pembimbing Draft/Skripsi**.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 jo No. 202 B Tahun 1998, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang menandatangani Surat Keputusan;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan Rektor Nomor 129 C tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- a. Menunjuk saudara : 1. Prof. Dr. Achmad Abubakar, M. Ag
2. Dra. Nila Sastrawati, M. Si
Sebagai pembimbing mahasiswa :
Nama : Muh. Yunus Saputra
NIM : 10300112026
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ HPK
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Wanita dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 151/Pid. B/2015/PN. Mks)
 - b. Melaksanakan pembimbing skripsi sampai mahasiswa tersebut selesai karya tulis ilmiah dengan baik;
 - c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2016;
 - d. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
pada tanggal : 18 Juli 2016
Dekan

Prof. Dr. DARUSSALAM, M. Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Samata, 18 Juli 2016

Nomor : SL.2/PP.00.9/ 1727/2016
Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi
An. Sdr (i). Muh. Yunus Saputra

Kepada YTH.

1. Prof. Dr. Achmad Abubakar, M. Ag (Pembimbing I)
2. Dra. Nila Sastrawati, M. Si (Pembimbing II)

Di,

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Bersama ini, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara (i), untuk menghadiri Seminar dan melaksanakan serta bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Proposal Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 26 Juli 2016
Waktu : 13.00 wita
Tempat : Ruang LT Lantai 1 Fak. Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melarikan Wanita dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 151/Pid. B/2015/PN. Mks)

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Dra. Nila Sastrawaty, M. Si

NIP. 19710712 199703 2 002

PENGESAHAN DRAFT SKRIPSI

Nomor: 1466/HPK/2016

Judul Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan negeri Makassar Nomor: 151/Pid.B/2015/PN.Mks)

Gowa, 2 September 2016

Penyusun,



Muh.yunus saputra

Nim. 10300112026

Pembimbing I



Prof. Dr. Achmad Abubakar, M.Ag.

Nip. 19700701 199403 1 001

Pembimbing II



Dra. Nila Sastrawati, M.Si.

Nip. 19710712 199703 2 002

Diketahui Oleh:

Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan



Dra. Nila Sastrawati, M.Si.

Nip. 19710712 199703 2 002

Disahkan Oleh:

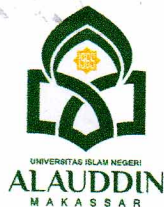
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Nip. 19621016 1990031 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/157/2016

Samata, 21 September 2016

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN** ✓

Kepada

Yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Muh. Yunus Saputra
Nim	: 10300112026
Fakultas/jurusan	: Syariah Dan Hukum / HPK
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Jl. Lambaselo, Sungguminasa - Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat
Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri
Makassar Nomor: 151/Pid.B/2015/PN.Mks)**

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Achmad Abubakar, M. Ag
2. Dra. Nila Sastrawati, M. Si

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Makassar terhitung mulai tanggal 21 September 2016 s/d 21 oktober 2016

Demikian harapan kami, atas bantuan bapak di ucapkan terima kasih.

Wassalam

Samata, 21 September 2016

An Rektor

Dekan Fakultas Syariah & Hukum



Prof. Dr. Darussalam, M. Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS

Jalan R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : info@pn-makassar.go.id, pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

451/1/16

LEMBAR DISPOSISI KEPANITERAAN

Tanggal dan nomor surat : 21 September 2016, 51.1/PP.00.9/1579/2016
Asal Surat : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR
Sifat Surat : Biasa/Penting/Rahasia
Isi Ringkasan : Permohonan izin penelitian An: Muh. Yunus Saputra

No. Reg. Surat : 4342 Tgl 23/09/2016

Instruksi/informasi Ketua/Wakil Ketua ditujukan kepada : 1. Wakil Ketua

familia
123/9/16

Sdr. Bener Haniyja SH.MH.-

2. Hakim/Majelis Hakim
- ③ 3. Panitera
4. Wakil Panitera
5. Panitera Muda Hukum
6. Panitera Muda Perdata
7. Panitera Muda Pidana
8. Panitera Muda Niaga
9. Humas
10. Panitera Muda PHI.
11. Panitera Muda TIPIKOR
12.

Panitera diteruskan Kepada :

Banter
126-16
7-16

1. Wakil Panitera
- ② 2. Panitera Muda Hukum
3. Panitera Muda Perdata
4. Panitera Muda Pidana
5. Panitera Muda Niaga
6. Humas
7. Panitera Muda PHI
8. Panitera Muda TIPIKOR
9.

Tanggal terima :

Pelaksana :



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

JL. R.A. KARTINI No.18/23 TELEPON : 0411 – 3624058 FAX : 0411 – 3634667

WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com

MAKASSAR 90111

Makassar, 06 Oktober 2016

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-U.1/ 305 /HKM/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera Pengadilan Negeri Makassar :

BASO RASYID, SH.,MH

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **MUH. YUNUS SAPUTRA**
NIM : 10300112026
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / HPK
Alamat : Jl. Lambaselo, Sungguminasa-Gowa
Judul Skripsi : **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MELARIKAN WANITA DENGAN TIPU MUSLIHAT PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR NOMOR : 151/PID.B/2015/PN.MKS)".**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016, dan telah dibimbing oleh :

1. **BONAR HARIANJA, SH.,MH**

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Dekan Fakultas Syariah & Hukum , Universitas Islam Negeri Makassar, tanggal 21 September 2016 dengan Nomor : SI.1/PP.00.9/ 1579/2016.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **Muh. Yunus Saputra**, NIM: 10300112026, mahasiswa Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Prespektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam (Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 151/Pid.B/2015/PN.Mks)."** memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di sidangkan pada ujian hasil.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 06 Januari 2017

Pembimbing I



Prof. Dr. Achmad Abubakar, M. Ag
NIP. 19700701 199403 1 001

Pembimbing II



Dra. Nila Sastrawati, M. Si
NIP. 19710712 199703 2 002



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 Nomor : 100 Tahun 2017
TENTANG
PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI.
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
 Nama : Muh. Yunus Saputra
 N I M : 10300112026
 Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
 Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2017
 Prihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
 Judul : "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Pengadilan Negeri Makassar No. 151 /Pid.B/ 2015/PN.Mks)"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
 b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
 c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
 4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 c Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 Sekretaris : Dr. Kurniati, M.Hi
 Penguji I : Hj. Rahmiati, S.Pd, M.Pd
 Penguji II : Subehan Khalik, S.Ag, M.Ag
 Pelaksana : 1. Mujahidah, SE
 2. Nurhayati Wahid
- Kedua** : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
 Pada tanggal : 27 Februari 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
 NIP. 19621016 199003 1 003

Tembususan
 Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;

Nomor : ~~Ger...~~ /SI.1/PP.00.9/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 27 Februari 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. Kurniati, M.Hi (Sekertaris)
 3. Hj. Rahmiati, S.Pd, M.Pd (Penguji I)
 4. Subehan Khalik, S.Ag, M.Ag (Penguji II)
 5. Prof. Dr. Ahmad Abubakar, M.Ag (Pembimbing I)
 6. Dra. Nila Sastrawati, M.Si (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Muh. Yunus Saputra

N I M : 10300112026

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Maret 2017

Waktu : Pukul 09.00 – 10.00

Tempat : Ruang Leb Yustisi

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi H P K tanggal 6 Februari 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan **Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif**, maka dipandang perlu menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta Ujian**;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan disertai tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan **Panitia, Penguji dan Peserta** Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : **Tugas Panitia** mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : **Tugas Penguji** melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : **Tugas Panitia dan Penguji** dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya **Surat Keputusan** ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : **Surat Keputusan** ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 6 Februari 2017
Dekan


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa

DAFTAR NILAI
UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
SEMESTER¹⁰ (.....) WISUDA PERIODE^{APRIL}
TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : Muh. Yanus Saputra

NIM : 10300112026

Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melarikan Wanita Dengan Tipu Muslihat Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 151/Pid.B/2015/PN-UKS)

NILAI MATA KULIAH				JUMLAH RATA-RATA
MKDU	MKDK	MKPP	KESELURUHAN	
(Dirasah Islamiyah)	(Fikih/Ushul Fikih)			
4	3	3	10	3,33

Samata, 14 - Maret - 2017

Kasubag.
Akademik dan Kemahasiswaan



MUJAHIDAH, S.E
NIP : 19670309 199303 2 002